

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Pemilihan umum merupakan suatu wadah bagi partai-partai yang bertindak sebagai alat perwakilan dan sarana untuk pergantian pemerintahan. Jadi, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai alternatif terbaik untuk menentukan figur pemimpin politik. Pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat Irak merupakan suatu hari yang bersejarah, karena merupakan pemilihan umum yang dilakukan pertama kali setelah dua tahun jatuhnya rezim Saddam Hussein. Oleh karena itu Pemilu saat ini merupakan sebuah tugas suci yang harus dijalankan demi membangun bangsa dan negara yang telah porak poranda akibat pendudukan Amerika.

Pemilu di Irak saat ini diikuti berbagai kelompok atau parpol. Meskipun demikian, dapat dikenali dengan mudah bahwa sebenarnya terdapat tiga kekuatan yang sedang bersaing untuk merebut posisi politik tertinggi, yakni kekuatan Syiah, Sunni, dan Kurdi. Kekuatan kelompok Syiah berada di bawah payung Aliansi Irak Bersatu pimpinan Ayotollah Ali Hussein al-Sistani. Koalisi tersebut terdiri dari 288 kandidat yang berasal dari 22 partai atau kelompok politik.

Golongan mayoritas Syiah yang terpinggirkan secara politik yang cukup lama akhirnya dapat meraih kekuasaan. Hasil perhitungan akhir suara pemilu

golongan Syiah, meraih suara tertinggi, 4,075 juta suara (51%) dari total 8,5 juta pemilih. Sementara Kurdi merebut 2,175 suara (26%). Sedangkan Sunni hanya mendapat sekitar 1,5 juta suara.<sup>1</sup>

Di Irak umat Syiah merupakan kelompok mayoritas, atau sekitar 60 persen dari 24 juta penduduk Irak. Ada kenaikan komposisi bila dibandingkan pada awal kemerdekaan dimana komposisi etnis agama di Irak adalah : 60 persen Arab Syiah, 21 persen Arab Sunni, 14 persen Kurdi Sunni, 5 persen Arab non Muslim, dan 6 persen non Arab non muslim. Namun mayoritas kepemimpinan politik diduduki oleh orang-orang Sunni. Dan kaum Syiah tidak mempunyai tepat untuk menduduki jabatan-jabatan politik.

Dalam pemilu kali ini merupakan kesempatan bagi kelompok Syiah sebagai peluang historis yang akan membawa mereka ke puncak kekuasaan setelah delapan decade sejak merdeka dari Inggris tahun 1932 di bawah dominasi Sunni, sekitar 20 persen dari total 24 juta jiwa penduduk. Kejatuhan rezim Baath pimpinan Saddam Husein april 2003 mengakhiri dominasi politik Arab Sunni dan nyaris mustahil untuk kembali berkuasa.

Kemenangan kelompok Syiah pada pemilu 2005 ini, tidak lepas dari jatuhnya rezim Saddam Husein sehingga kaum Syiah dapat menggunakan hak politiknya dan adanya dukungan mayoritas kelompok Syiah yang merupakan kelompok mayoritas yaitu sekitar 60 persen dari 24 juta penduduk Irak, sehingga kebijakan yang dibuat Ayatollah Ali Husseini al-sistani untuk melaksanakan pemilu merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan

<sup>1</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com), Senin, 14 Februari 2005

pemerintahan yang legitimate serta untuk mengakhiri pendudukan AS dan merefleksikan keinginan kuat kelompok Syiah untuk mendominasi pemerintahan Irak pasca rezim Baath. Dan peran serta Amerika Serikat dalam pengambilan proses pemilu untuk pelaksanaan di Irak yang menjadi kendala bagi kelompok syiah dalam mencapai kemenangan dalam pemilu.

Untuk itu penulis memutuskan untuk menulis skripsi tentang **“KEMENANGAN KELOMPOK SYIAH DALAM PEMILU 2005 DI IRAK”** sebagai judul skripsi yang akan diteliti.

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kelompok Syiah menang dalam pemilihan umum tahun 2005.
2. Tulisan ini adalah sebagai meraih gelar kesarjanaan (SI) dala disiplin Ilmu Hubungan International dan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Sebagai sarana pendalaman terhadap ilmu pengetahuan yang selama ini

### C. Latar Belakang Masalah

Irak merupakan negara yang berada di sebelah barat Asia dan terletak pada daerah yang subur. Irak terletak di ujung utara teluk Persia. Akses ke laut hanya pantai sepanjang 30 mil dengan dua pelabuhan utama yaitu Ummi Qasr dan Basra yang lebih menjorok ke dalam di delta antara sungai Eufrat dan Tigris. Dataran rendah yang subur yang terletak antara Basra, Baghdad, sungai Eufrat dan Tigris inilah yang didiami sebagian besar rakyat Irak. Wilayah bagian utara, antara Mosul dan Kirkuk terdapat dataran tinggi dan pegunungan yang curah hujannya cukup untuk mendukung pertanian. Dan di daerah ini merupakan daerah sumur minyak yang paling besar dan paling produktif.

Komposisi penduduk Irak mencakup suku Kurdi yang mencapai sekitar 14 persen dan tersebar di sebelah utara dan di dekat sumur minyak di dekat Kirkuk. Mereka meskipun sudah Islam tetapi tetap mempertahankan identitas etnisnya. Selain suku Kurdi juga terdapat minoritas lainnya yaitu orang-orang Turki, Iran, Turkoman dan Assyrian serta penganut agama Yahudi serta aliran keagamaan lainnya yang bertempat tinggal tersebar diseluruh negara atau terpusat di kota-kota. Agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk, yaitu sekitar 81 persen menganut agama Islam aliran Sunni dan Syiah. Penduduk Irak yang penganut aliran Sunni yang merupakan 21 persen dari jumlah penduduk Irak yang bertempat tinggal di bagian barat laut Irak. Sedangkan penduduk Irak penganut

aliran Syiah yang mencapai 60 persen populasi penduduk Irak terkonsentrasi di sebelah selatan di dekat Basra.<sup>2</sup>

Penduduk Irak diperkirakan 24 juta dengan pertumbuhan penduduk tahunan sebesar 3 persen. Baghdad sebagai kota terbesar dan ibukota negara berpenduduk sekitar 4 juta disusul oleh Basra dan Mosul. Penduduk Irak terdiri dari beberapa kelompok etnis. Dua terbesar adalah Syiah dan Sunni yang mencapai 85 persen dan Kurdi yang mencapai sekitar 15 sampai 20 persen. Meskipun termasuk negara Arab, tetapi Irak tidak jarang bermusuhan dengan negara-negara Arab lainnya. Arab Irak sendiri masih terbagi ke dalam faham-faham seperti Sunni dan Syiah.

Dengan melihat perbandingan penduduk secara etnis-religius, dapat dikatakan bahwa penduduk Arab penganut aliran Sunni merupakan minoritas bila dibandingkan dengan penganut aliran Syiah yang berjumlah hampir 60 persen dari seluruh jumlah penduduk Irak. Tetapi walaupun minoritas, penduduk Irak penganut aliran Sunni mempunyai peran yang dominan dalam percaturan politik di Irak dan kaum Syiah tidak mempunyai banyak tempat untuk menduduki jabatan-jabatan politik.

Dikalangan elit politik Irak, sejak tahun 1978 sampai pertengahan 1991, hanya dua orang Syiah yang menjadi anggota pemerintahan dan menduduki posisi penting, yaitu Deputy Perdana Menteri Saudon Illamdi dan Menteri Pertahanan Tuma Abbas. Memang sejak pemerintahan Ahmad Hassan (1968-1979) dan

<sup>2</sup> Harwanto Dahlan, *Politik dan Pemerintahan Timur Tengah*, Diklat Kuliah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal 118.

Saddam Hussein (1979-2003) panggung politik Baghdad justru didominasi kelompok minoritas Arab Sunni, dan khususnya partai Baath.<sup>3</sup>

Di bawah kepemimpinan Saddam Hussein, Irak mencoba menata sistem republik dengan cita-cita mewujudkan negara demokratis. Dalam konstitusi negara yang dilandasi oleh nilai-nilai ideologi Baathisme, melihat demokrasi dan kebebasan sebagai dasar hidup setiap umat manusia. Walaupun dalam konstitusi mensyaratkan adanya demokrasi dengan ciri multipartai, adanya pemilihan umum dan kekuasaan yang tidak tunggal, namun dalam kepemimpinan Saddam Hussein, nilai-nilai demokrasi yang ada dalam konstitusi itu menjadi bias sebab yang terjadi sesungguhnya dalam sistem politik di Irak adalah presiden Irak masih tetap satu orang yaitu Saddam Hussein. Sentralisme kekuasaan tunggal di Irak ini telah menyampingkan kelompok-kelompok oposisi yang sebenarnya cukup banyak di Irak.

Sebagai manifestasi kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagai mana yang tercantum dalam konstitusi, Saddam memberlakukan pemilihan umum dalam sekali lima tahun. Pemilihan umum ini sebenarnya lebih kepada pemilihan tunggal seorang presiden, artinya, konsepsi pemilihan umum ini dimanifestasikan oleh Saddam Hussein pada referendum untuk memilih Saddam atau tidak.<sup>4</sup> Terlepas apakah referendum itu demokratis atau tidak, namun untuk kesekian kalinya, Saddam Hussein dengan kendaraan politik partai sosialis Ba'athnya kembali berkuasa setelah hasil referendum itu kembali secara mutlak memilih

---

<sup>3</sup> Samh Al-Khalil, *Republic of Fear*, Huthingson Padius, 1990, dikutip dan ini Riza Sihbudi, Ini Hamdan Basyar, dan Happy Bone Zulkarnan, *Konflik dan Diplomasi Di Timur Tengah*. (Bandung: Eresto, 1993). Hal 101.

Saddam Hussein untuk tetap menjadi Presiden Irak dan dalam sistem kepartainnya masih di dominasi oleh kepemimpinan tunggal partai Ba'ath yang di dominasi oleh kelompok Sunni. Maka sebenarnya yang terjadi bukanlah demokrasi tetapi, merupakan rezim otoriter yang dibalut dengan embel-embel demokrasi.

Dominasi kelompok minoritas Arab Sunni dan panggung politik Baghdad inilah yang menjadi sumber utama pertentangan kaum Syiah dengan rezim Saddam Hussein di Irak. Motif operasional orang-orang Syiah tidak hanya dilandasi oleh ketidakrepresentatifnya jabatan-jabatan politik pada rezim Saddam Hussein. Namun dalam fenomena sejarah Irak, kaum Syiah sudah lama melakukan pemberontakan-pemberontakan politik.

Pemberontakan kaum Syiah pertama kali sejak kemerdekaan Irak. Dan gerakan Syiah baru terorganisasi pada akhir tahun 1950-an, yaitu ketika sejumlah ulama dan aktivis Syiah seperti Muhammad Mahdi, Syaid Kazim, Al-Hairi, Mabdi Ali Akbar Shariati dan Hamid Muhajir mendirikan Partai Dakwah Islam di Najaf. Dan dua puluh tahun kemudian (1979) di Baghdad lahir organisasi kaum Syiah yang *al-mujahidiri*. Kelompok ini didirikan antara lain oleh Sayyid Abdul Aziz Al-Hakim. Berbeda dengan Partai Dakwah yang menghendaki berdirinya rezim Islam Irak yang independen. *Al-Mujahidin* secara tegas mengakui kepemimpinan Ayatullah Khomeini, dan dengan sendirinya menginginkan Rezim Islam Irak berorientasi ke Teheran.

Penumpasan yang dilakukan rezim Saddam terhadap gerakan kaum Syiah menyebabkan terjadinya eksodus warga Syiah Irak ke Iran. Di samping ke Iran, sejumlah aktivis Partai Dakwah lainnya menyelamatkan diri ke Inggris, Lebanon

dan Suriah. Yang kemudian antara Irak-Iran pun semakin meruncing dengan berkobarnya Perang Teluk I.<sup>5</sup>

Periode antara tahun-tahun 1991 hingga serangan Amerika dan Inggris ke Irak pada tahun 2003, merupakan periode yang penuh dengan kesulitan untuk kaum Syiah. Karena selain penumpasan besar-besaran yang dilakukan oleh rezim Saddam, mereka juga berhadapan dengan masalah kelaparan dan musibat yang muncul dari embargo ekonomi yang disahkan oleh Dewan Keamanan terhadap rezim Saddam. Tekanan terberat menimpa rakyat, khususnya orang-orang Syiah. Dengan ini masyarakat Syiah Irak terpaksa menanggung hidup penuh penderitaan, terutama selama pemerintahan Saddam yang kejam.

Ketika rezim Saddam ditumbangkan oleh serangan AS dan Inggris ke Irak pada bulan April 2003, rakyat negara ini, khususnya kaum Syiah telah terselamatkan dari kejahatan dan kebrutalan rezim ini. Tetapi tumbangannya Saddam dan pemerintahan despotiknya diikuti pula oleh masalah lain yaitu pendudukan Irak oleh AS. Dengan kata lain, rakyat Irak yang selamat dari cengkeraman penguasa diktator, kini terperosok pula ke dalam perangkap penjajah. Memang benar bahwa tentara AS menduduki Irak dengan alasan untuk menegakkan demokrasi di negara ini. Akan tetapi semua orang tahu bahwa sebenarnya Washington sedang merampok seluruh kekayaan Irak dan menancapkan kekuasaannya lebih kuat lagi di kawasan ini.

---

<sup>5</sup> Hamid Enayat, *Deakel Politik Sunni dan Syiah* (Bandung: Duta, 1992), hal. 121

Menghadapi kondisi seperti ini, masyarakat Syiah Irak telah mengeluarkan statemen yang jelas dan tegas. Meskipun mereka telah selamat dari pemerintahan tangan besi penguasa diktator yang haus darah, tetapi mereka sama sekali tidak bersedia menerima penjajahan negara mereka. Rakyat dan ulama Syiah sejak awal telah menekankan bahwa AS dan kekuatan-kekuatan imperialis lain harus sesegera mungkin mengakhiri kehadiran mereka di Irak dan menyerahkan urusan negara ini kepada rakyatnya sendiri. Ayatullah Sayid Muhammad Baqir Hakim, seorang tokoh ulama terkenal Syiah, yang hingga akhir hayat beliau menjabat sebagai ketua Dewan Tertinggi Revolusi Islam Irak, pada tanggal 29 Oktober 2003 telah gugur syahid dalam satu peristiwa terror yang sangat tragis. Beliau merupakan seorang yang selalu menegaskan ketidakpercayaan rakyat Irak terhadap AS. Ayatullah Udhma Sayid Ali Sistani, pemimpin agama atau marja' tertinggi di Irak, juga mengkritik keras pendudukan negara Irak ini oleh pihak asing dan meminta pelaksanaan pemilu parlemen di Irak.<sup>6</sup>

Kemudian dua tahun pascajatuhnya rezim Saddam Husein, rakyat melangsungkan pemilihan umum, Minggu, 30 Januari 2005. Dihari bersejarah itu Pemilu yang demokratis dilaksanakan setelah lama dibawah pemerintahan yang otoriter. Dihari bersejarah itu rakyat Irak memilih 275 anggota Majelis Nasional yang memiliki tugas utama menyusun konstitusi baru dan memilih presiden dan wakil presiden.

<sup>6</sup> [www.irib.ir](http://www.irib.ir), 25 Januari 2005

Dalam pelaksanaan pemilu tersebut, terdapat penolakan oleh Sunni terkait dengan asumsi, proses politik itu direkayasa AS. Ketakutan mereka terutama juga terhadap berkuasanya kaum Syiah. Golongan Syiah memandang pemilu sebagai peluang historis yang akan membawa mereka ke tampuk kekuasaan setelah delapan dekade-sejak merdeka dari Inggris tahun 1932-di bawah dominasi minoritas Sunni, sekitar 20 persen dari total 24 juta jiwa penduduk. Kejatuhan rezim Baath pimpinan Presiden Saddam Husein April 2003 mengakhiri dominasi politik Arab Sunni dan nyaris mustahil untuk kembali berkuasa.<sup>7</sup>

Dan juga terdapat penentangan kuat dari kubu Syiah menyangkut hak-hak istimewa yang telah diperoleh Kurdi saat ini dalam penyusunan konstitusi permanen nanti. Di antaranya, keberatan Syiah adalah penyamaan bahasa Arab dengan bahasa Kurdi dan adanya hak veto Kurdi. Namun, akan amat sulit bagi kelompok mana pun untuk mengubah posisi Kurdi saat ini karena dua hal: Kurdi menjadi penentu eksistensi Irak dan. Adanya dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada kelompok Kurdi untuk memenangkan pemilu tersebut. Amerika dan mantan penguasa pendudukan Paul Bremmer sebelum pemilu dilaksanakan di Irak Ahad, 30 Januari 2005, mengusulkan sistem pemilunya, seharusnya bukan pemilihan umum langsung. Amerika dan sekutu Iraknya semula ingin memilih tokoh-tokoh masyarakat tertentu yang kemudian bisa dipilih melalui pemilu. Dengan kata lain Amerika menghendaki seleksi bagi para caleg, untuk menghambat kemenangan mayoritas kelompok Syiah dalam pemilu. Karena

---

7. *Al-Arabiya*, 12 Desember 2003, hal. 1.

Amerika Serikat menghendaki sebuah bangunan negara pasca-Saddam, dengan menyodorkan nilai-nilai demokrasi rakyat versi Amerika. Otomatis pola bangunan demokrasi rakyat versi Amerika, setidaknya-tidaknya akan meminimalisasi nilai-nilai Islam dan peran-peran lembaga Islam, dengan menggantikan jubah demokrasi yang berbau sekular.

Namun terdapat kelompok Syiah Pimpinan Ali Sistani, yang tidak mau menerima tawaran sistem kenegaraan Barat atau demokrasi rakyat yang didesakkan Amerika. Kaum Syiah akan menjadikan momentum kejatuhan Saddam, untuk merayakan kembali nilai-nilai Islam dalam konstelasi kehidupan rakyat Irak, yang selama ini dikerangkeng orde Saddam. Tarik-menarik ini, akan menjadi satu babakan baru bagi Amerika sekaligus ancaman potensial terbentuknya pemerintahan masa transisi menuju demokrasi. Amerika yang pasti, tidak menghendaki Syiah mendominasi sistem pemerintahan di Irak, karena Syiah telah membuktikan bahwa Amerika di tangan kelompok Syiah, bisa dikalahkan. Fakta yang bisa diapungkan adalah peristiwa jatuhnya rezim Reza Pahlevi, penguasa Iran, di tangan Ayatullah Khomeini dan kelompok Syiah. Meskipun waktu itu, Reza Pahlevi adalah boneka Amerika.

#### **D. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian situasi di atas, maka problematika yang dikemukakan adalah :

## E. Kerangka Teori

### 1. Encouraging Democracy.

Berdasarkan dari konsep Huntington, bahwasanya Amerika Serikat ingin menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya demokrasi diseluruh dunia<sup>8</sup>. Dalam hal ini Amerika Serikat melaksanakan invasi ke Irak bertujuan untuk menegakkan demokrasi karena pemerintahan Saddam Hussein melaksanakan pemerintahan yang otoriter. Pasca Invasi AS yang berhasil menjatuhkan pemerintahan Saddam Hussein, Amerika Serikat membentuk pemerintahan Sementara (DPI) untuk mengisi kekosongan pemerintahan. Setelah itu pemerintahan AS menerapkan pelaksanaan demokrasi dengan melaksanakan pemilu sebagai program pengalihan kekuasaan dari AS pada rakyat Irak, dengan sistem proposional. Oleh karena itu Amerika Serikat mengangkat Ahmad Chalabi pemimpin INC (*Iraqi National Congress*) yang merupakan dari kelompok Syiah sebagai figur yang dijogakan AS untuk duduk dalam pemerintahan, namun Ahmad Chalabi merupakan tokoh yang tidak disukai oleh rakyat, sehingga AS mengangkat figur Syiah yang lain, Perdana Menteri Ayad Allawi dengan kalkulasi akan mendapat cukup suara dari komunitasnya untuk membentuk aliansi dengan Kurdi yang pro-AS yang akan memungkinkan Allawi tetap dalam posisi sebagai kepala pemerintahan selama pembuatan konstitusi. Seperti dimaklumi, apa yang dipilih dalam pemilu Irak adalah parlemen dan pemerintahan interim.

Namun terdapat pertentangan dari kelompok Syiah pimpinan Ali Sistani dengan Otoritas AS yaitu terletak pada mekanisme pemilihan Majelis Nasional

<sup>8</sup> Lihat dalam Myron Weiner and Samuel E. Huntington (ed.), *Understanding Political Development*, Little Brown & Co, Boston, 1987

## 2. Konsep Sistem Pemilihan Umum

Dalam ilmu politik, sistem pemilihan umum diartikan sebagai satu kumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para wakil mereka. Sehingga sebuah lembaga perwakilan rakyat dipilih, maka sistem pemilihan umum mentransfer jumlah suara ke dalam jumlah kursi.

Dalam sistem pemilihan umum terdapat dua sistem pemilihan yaitu sistem pemilihan distrik dan sistem pemilihan proporsional.

### 2.1 Sistem Proporsional

Sistem ini disebut juga system *Perwakilan Berimbang* atau *multi-member constituency*. Dalam sistem ini kursi yang ada di parlemen pusat dioerebutkan dalam suatu pemilihan umum sesuai dengan imbalan suara yang diperoleh partai/organisasi tersebut dalam pemilihan umum tersebut. Apabila wilayah tersebut luas. Maka wilayah negara tersebut dibagi atas daerah-daerah pemilihan dan kursi diperebutkan di parlemen pusat dibagikan kepada daerah-daerah pemilihan, sesuai dengan komposisi atau jumlah penduduk yang ada di daerah pemilihan tersebut. Misalnya dengan menentukan tiap wakil harus didukung oleh 400.000 penduduk, maka daerah yang mempunyai penduduk 4.000.000 dijatahkan 10 kursi untuk diperebutkan oleh partai-partai organisasi peserta pemilihan umum di daerah pemilihan tersebut.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Mah Kusnadi dan Distan B. Samsik. *Ilmu Negara dan Media Massa*. Jakarta: 1998. h. 135

## 2.2 Sistem Pemilihan Distrik

Sistem ini disebut juga sistem mayoritas atau *single-member constituency*. Dalam sistem ini wilayah negara yang menyelenggarakan sistem ini dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di Parlemen untuk diperebutkan dalam suatu pemilihan umum. Wakil yang dipilih hanya satu orang (itulah sebabnya disebut juga *system single-member constituency*) yaitu pemilihan di distrik bersangkutan (karena itu pula sistem ini disebut sistem mayoritas). Besar sebuah distrik dapat berbeda satu sama yang lain karena jumlah perbedaan penduduk. Besaran kursi yang diperebutkan bagi sebuah distrik (*district magnitude*) merupakan sesuatu yang sangat penting, dikarenakan akan menentukan nasib partai-partai politik di kemudian hari. Dalam pembagian wilayah suatu distrik terbagi menjadi dua yaitu

1. Negara yang menggunakan wilayah negara sebagai sebuah distrik, sehingga memungkinkan partai kecil untuk mendapatkan kursi.
2. Negara yang membagi wilayah negara ke dalam distrik, dengan besaran (*magnitude*) yang berbeda. Sehingga semakin besar *magnitude* sebuah distrik, akan semakin besar partai kecil akan terlindungi. Sebaliknya, kalau *district magnitudenya* kecil, maka partai yang memperoleh 10% dari total suara pun tidak akan memiliki peluang

Dalam sistem ini prosesnya lebih cepat dan hubungan pemilih biasanya mengenal calon-calonnya.<sup>10</sup> Kemenangan kelompok Syiah dalam pemilihan umum ini, sangat diuntungkan karena dengan menggunakan sistem distrik maka suara dari pemilih dari tiap-tiap basis-basis kelompok Syiah, yang merupakan mayoritas di Irak sekitar 60% dari keseluruhan penduduk Irak. Dengan sistem satu orang satu suara ini maka akhirnya orang-orang Syiah memiliki wakil dalam parlemen sesuai dengan jumlah mereka sebagai warga mayoritas. Dengan cara serupa orang-orang Kurdi yang membentuk pesatuan daftar caleg, karena itu sekarang mereka kuat terwakili dalam pemerintahan pusat Irak. Ini jelas revolusi bagi perimbangan kekuasaan di Irak. Di bawah Saddam dan bahkan sebelum diktator ini berkuasa, orang-orang Sunni selalu paling menentukan di Irak, padahal mereka cuma minoritas. Oleh karena itu jumlah suara yang di diperoleh kelompok Syiah yaitu 4,075 suara (51% persen) dari total 8,5 juta pemilih, sedangkan Kelompok Kurdi mendapatkan 2,175 juta suara dan kelompok Sunni 1,5 juta suara. maka secara langsung kelompok Syiah akan mendapatkan jumlah kursi mayoritas dalam parlemen.

### 3. Teori Pemilih

Mark N Hagopian dalam menjelaskan mengapa masyarakat memilih suatu partai, menurutnya dipengaruhi oleh<sup>11</sup> :

- a. Motif ideologi partai tersebut.

- b. Keuntungan-keuntungan yang mungkin diraih oleh kelompok-kelompok dari partai yang dipilihnya.
- c. Isu-isu politik yang berkembang pada saat-saat tertentu (*Nature of the time*).
- d. Tradisi individu dalam melakukan pilihan (*No issue content*).

Merujuk pada kriteria diatas maka dapat disebutkan beberapa faktor yang mendukung kemenangan Syiah di Irak pada pemilu 2005 adalah:

Faktor pertama, motif ideologi partai, sebagai kelompok mayoritas Syiah yang diwakili oleh Partai Aliansi Irak Bersatu, mencari dukungan dengan menggunakan kelas daerah dan ideologi. Partai Aliansi Irak Bersatu tetap memimpin suara dan jauh meninggalkan rival-rivalnya. partai yang didukung ulama Syiah paling berpengaruh di Irak, Ayatullah Sistani, itu terus menghimpun suara mayoritas mutlak antara 70 hingga 85 persen di sebagian besar propinsi Irak, termasuk Baghdad, Basrah, Diyalah, Karbala, Najaf, al-Imarah, dan Diwaniah.

Faktor kedua, adalah keuntungan-keuntungan yang dapat diraih oleh kelompok-kelompok dari partai yang dipilihnya. Para pendukung partai aliansi Irak Bersatu yang sebagian besar adalah masyarakat Irak yang mayoritas menganut Islam Syiah, yang selama pemerintahan Saddam Hussein, masyarakat Syiah menjadi masyarakat yang dipinggirkan dan tidak mempunyai kedudukan dalam pemerintahan. Sehingga dengan pemilu ini kelompok Syiah yang diwakili

dari masyarakat Irak yang mayoritas kelompok Syiah sekitar 60% dari keseluruhan penduduk, di Irak. Maka kemenangan Kelompok Syiah Dengan partainya yaitu Partai Aliansi Irak Bersatu akan lebih memperhatikan kepentingan masyarakat Syiah yang selama ini dipinggirkan dengan program yang ditawarkan partai Aliansi Irak Bersatu.

Faktor ketiga, isu-isu politik yang berkembang pada saat-saat tertentu. Yaitu dengan adanya isu politik yang dikemukakan oleh partai Aliansi Irak Bersatu dalam pemilu sehingga memberikan keuntungan bagi partai untuk memenangkan pemilu. Isu yang diangkat yaitu penarikan pasukan Amerika dari Irak, kelompok Syiah menekankan bahwa penarikan pasukan dari Irak selambat-lambatnya 18 bulan setelah pemilu selesai diselenggarakan sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat Irak untuk segera lepas dari pasukan Amerika Serikat dan bentuk konstitusi setelah pemilu, kelompok Syiah dengan partai Aliansi Irak Bersatu memberikan opsi atau pilihan bahwa konstitusi yang akan dibentuk setelah pemilu usai yaitu sebuah konstitusi yang berbentuk sebuah pemerintahan yang menegaskan persatuan Irak dengan menekankan pada keragaman dan pluralisme tanpa menonjol-nonjolkan sektarianisme, isu ini merupakan isu yang didukung tidak hanya dari kalangan kelompok Syiah saja namun juga dari kalangan Sunni dan Kurdi. Maka kelompok Syiah dengan mengangkat isu tersebut mampu meraih suara tidak hanya dari kalangan Syiah saja namun juga dari semua elemen.

Faktor keempat, tradisi individu dalam melakukan pemilihan. Dalam

tidak terlalu memperhatikan isu-isu, program partai dan sebagainya. Mereka memilih partai karena tradisi kesediaan terhadap pemimpin (mengkultuskan individu) demikian pula di Irak, Masyarakat memilih partai Aliansi Irak bersatu (UIA), karena partai ini merupakan partai yang direstui Ayatollah Sistani sebagai pimpinan spiritual warga Syiah yang dikenal diseluruh dunia dan tak ada yang berani menentangnya di Irak. Jumlah warga Syiah di negara Irak mencapai sekitar 60 persen. Dan jika warga Syiah mempunyai sejumlah pemimpin, seperti Mohammad Baqr Al Sadr, Mahdi Al Hakim dan Moqtada Al-Sadr, mereka tetap menghormati Sistani sebagai pemegang otoritas tertinggi.

#### **F. Hipotesa**

Dari analisa di atas, penulis mendapatkan suatu hipotesa, bahwa kemenangan kelompok Syiah pada pemilu 2005 di Irak disebabkan

- a. Campur tangan Amerika Serikat terhadap pelaksanaan pemilu, yang menghasilkan sistem pemilihan umum secara langsung dengan sistem distrik yang menguntungkan kelompok Syiah.
- b. Pelaksanaan pemilu yang menggunakan sistem distrik di Irak yang menguntungkan mayoritas kelompok Syiah .
- c. Ideologi partai Aliansi Irak Bersatu yang merupakan wakil kelompok Syiah dalam Pemilu di Irak, mempunyai ideologi Islam Syiah

## H. Jangkauan Penelitian

Untuk memudahkan penulis di dalam bahan analisis, maka penelitian ini memerlukan batasan. Penelitian ini akan dimulai dari invasi Amerika tahun 2003 yang merupakan salah satu faktor kebangkitan kaum Syiah dengan menjatuhkan rezim Saddam Hussiu sampai kemenangan Syiah dalam pemilu Irak tahun 2005.

## I. Sistematika Penulisan

- BAB I : Berupa pendahuluan, yang terdiri dari : Alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penulisan dan sistematika penulisan.
- BAB II : Membahas tentang keadaan politik di era Saddam Husein, yang mencakup pembangunan politik di era Saddam Hussein yang akan menjelaskan mengenai kehidupan kelompok Syiah, Sunni dan Kurdi. Dan hubungan luar negeri Irak dengan Iran, yang mencakup Irak Sunni dan Iran Syiah dan Campur tangan Amerika dalam pereseteruan Irak dengan Iran, dan Invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003.
- BAB III : Membahas tentang Pemilu Irak 2005, yang berisi tentang proses Pemilu di Irak, kemenangan kelompok Syiah, Ambisi